



**APANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
TERHADAP 5 RANCANGAN PERATURAN DAERAH DARI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026**



*ASSALAMUALAIKUM WAR. WAB.*

- YTH. BUPATI SUMBAWA DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
- YTH. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD SUMBAWA
- YTH. ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
- YTH. SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, KEPALA DINAS, BADAN, KANTOR, PARA CAMAT DAN LURAH SEKABUPATEN SUMBAWA
- YTH. PIMPINAN PARTAI POLITIK, PEMUKA AGAMA, PEMUKA MASYARAKAT, TOKOH WANITA DAN TOKOH PEMUDA, INSAN PERS SERTA PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN
- SINGKATNYA HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MENGHADIRKAN RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA PADA HARI INI KITA DIBERIKAN KESEMPATAN MENGIKUTI SIDANG PARIPURNA PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN. SUMBAWA TAHUN 2026 DALAM RANGKA MENUNAIKAN TUGAS KONSTITUSIONAL SEBAGAI WAKIL RAKYAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN ALAM, NABI BESAR MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA, SAHABAT, SERTA PENGIKUTNYA UNTUK MEMBAWA RAHMAT, MEMBAWA UMMAT MANUSIA DARI ALAM JAHILIAH YANG PENUH KEGELAPAN MENUJU ALAM KEIMANAN YANG TERANG BENDERANG DAN PENUH KEDAMAIAN SAMPAI YAUMUL KIAMAH.



TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI GUNA MENYAMPAIKAN PENDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN TERHADAP PENJELASAN BUPATI SUMBAWA TENTANG 5 (LIMA) RANCANGAN PERDA DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026 PADA SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT HARI INI.

FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN MENGAPRESIASI DISAMPAIKANNYA 5 (LIMA) RANPERDA SEBAGAI IKHTIAR PEMDA DALAM MENJALANKAN VISI “KABUPATEN SUMBAWA YANG UNGGUL, MAJU, DAN SEJAHTERA”, YANG AKAN DIWUJUDKAN MELALUI 5 MISI UTAMA, TERMASUK “TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN TRANSPARAN” SERTA “PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

NAMUN, VISI BESAR HARUS DIUJI DENGAN KERJA NYATA.

PEMANDANGAN UMUM KAMI INI BUKAN SEKEDAR FORMALITAS PARIPURNA, MELAINKAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL FRAKSI KAMI AGAR SETIAP PERDA YANG LAHIR BENAR-BENAR MENJAWAB PERMASALAHAN RAKYAT SUMBAWA.

SEMOGA SEGALA KRITIKAN, SARAN DAN HARAPAN FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN DALAM SIDANG DEWAN HARI INI, BENAR-BENAR DIJADIKAN SEBAGAI KERANGKA KONSTRUKTIF UNTUK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

#### **HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,**

PADA SIDANG PARIPURNA PERTAMA YANG LALU, WAKIL BUPATI SUMBAWA TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN SECARA UMUM TERHADAP 5 RANPERDA DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026, YANG TERDIRI ATAS :

1. RANCANGAN PERDA TENTANG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026-2030.
2. RANCANGAN PERDA TENTANG TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3. RANCANGAN PERDA TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.
4. RANCANGAN PERDA TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN SUMBAWA
5. RANCANGAN PERDA TENTANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

SETELAH MENDENGAR PENJELASAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERDA DARI MERINTAH KAB. SUMBAWA TAHUN 2026, FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN MENYAMPAIKAN CATATAN KRITIS BERBASIS DATA :



## **1. RANCANGAN PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BUMD 2026-2030**

FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN MENYAMBUT POSITIF ADANYAN INISIATIF PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGAJUKAN RANPERDA INI. PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BUMD MERUPAKAN INSTRUMEN STRATEGIS UNTUK MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN DAERAH, MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN MENYEDIAKAN LAYANAN PUBLIK YANG PRIMA BAGI MASYARAKAT KAB. SUMBAWA.

NAMUN FRAKSI KAMI MENYADARI BAHWA PERIODE 2026-2030 ADALAH PERIODE YANG PENUH TANTANGAN, KITA MENGHADAPI KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL, PENURUNAN ALOKASI DANA TRANSFER DARI PUSAT, SERTA TUNTUTAN MASYARAKAT AKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABLE. OLEH KARENA ITU, PENYERTAAN MODAL TIDAK BOLEH SEKEDAR MENJADI SUNTIKAN DANA” TANPA ARAH, MELAINKAN HARUS MENJADI INVESTASI CERDAS YANG MENGHASILKAN RETURN NYATA BAGI DAERAH.

SEBELUM KITA MEMASUKI TAHAP PEMBAHASAN LEBIH LANJUT, FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN MENYAMPAIKAN BEBERAPA PANDANGAN, CATATAN KRITIS DAN PERTANYAAN MENDASAR TERKAIT RANPERDA INI, SEBAGAI BERIKUT :

### **1. URGENSI DAN ALIGNMENT DENGAN RPJMD**

PERNYERTAAN MODAL INI HARUS SELARAS SEPENUHNYA DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SUMBAWA 2025-2029.

MISI “PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING” HANYA BISA TERCAPAI JIKA BUMD JADI LOKOMOTIF PAD, BUKAN LUBANG HITAM DAN HANYA JADI BEBAN APBD.

BERDASARKAN DATA DAN FAKTA PENYERTAAN MODAL EKSISTING, BERDASARKAN PASAL 4 DRAF RANPERDA, PEMKAB SUMBAWA SUDAH MENANAMKAN MODAL KEPADA :

**PERUMDAM BATULANTEH : RP. 16.334.533.346 ( 16,3 MILYAR RUPIAH)**

**PT. SABALONG SAMALEWA (PERSERODA) : RP. 2.317.556.718 ( 2,3 MILYAR RUPIAH)**

**PT. BANK NTB SYARIAH : RP. 79.650.192.974 ( 79,6 MILYAR RUPIAH )**

**PT. BPR NTB (PERSERODA) : RP. 21.648.050.255 ( 21,6 MILYAR RUPIAH)**

**TOTAL NYA RP. 119.950.333.293 ATAU 119,2 MILIAR RUPIAH UANG RAKYAT SUDAH MASUK KE 4 BUMD INI.**

**PERTANYAAN KAMI : SEJAUH MANA RENCANA BISNIS (BUSINESS PLAN) MASING-MASING BUMD PENERIMA MODAL 2026-2030, TELAH DISESUAIKAN DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ?. APAKAH PENYERTAAN MODAL INI BENAR-**



BENAR DITUJUKAN UNTUK EKSPANSI USAHA YANG PRODUKTIF, ATAU HANYA MENUTUPI KERUGIAN OPERASIONAL MASA LALU (BAILOUT).

TUNTUTAN FRAKSI KAMI : PEMDA WAJIB MEMBUKA DATA KINERJA 5 TAHUN TERAKHIR **DARI RP. 119,2 MILIAR ITU**, BERAPA DIVIDEN YANG SUDAH MASUK KE KAS DAERAH 3 TAHUN TERAKHIR ? BERAPA BUMD YANG MASIH MERUGI ?,

RAKYAT BERHAK TAHU SEBELUM KITA BICARA TAMBAH MODAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2026-2030. FRAKSI KAMI MENOLAK KERAS PENYERTAAN MODAL YANG DIGUNAKAN SEMATA-MATA UNTUK MENYELAMATKAN BUMD YANG TIDAK EFISIEN TANPA ADA RENCANA RESTRUKTURISASI FUNDAMENTAL.

## **2. PROFIL KINERJA BUMD PENERIMA MODAL.**

SEBELUM MEMUTUSKAN BESARNYA MODAL YANG DISETOR. DPRD/KAMI HARUS DIBERIKAN GAMBARAN UTUH MENGENAI KESEHATAN FINANSIAL BUMD YANG ADA SAAT INI.

PERTANYAAN KAMI : DAPATKAH PEMERINTAH DAERAH MEMAPARKAN LAPORAN KEUANGAN TERAUDIT DARI KE EMPAT BUMD UNTUK 3 TAHUN TERAKHIR ?, BERAPA TINGKAT KEBOCORAN AIR/LOSSES JIKA BERBENTUK AIR MINUM.

YANG MENJADI SYARAT FRAKSI KAMI : **LAMPIRKAN AUDIT KINERJA & BUSINESS PLAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2026-2030 TIAP BUMD PENERIMA MODAL DALAM DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM). SERTA SEBUTKAN TARGET DIVIDEN, BREAK EVEN POINT (BEP) / BALIK MODAL, DAN EXIT STRATEGY JIKA BUMD MERUGI HARUS MENJADI LAMPIRAN PERDA.**

CATATAN FRAKSI KAMI : KAMI KHAWATIR PENYERTAAN MODAL BARU HANYA AKAN "TENGCELAM" JIKA TATA KELOLA INTERNAL BELUM DIPERBAIKI. PRINSIP **GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)** HARUS MENJADI SYARAT MUTLAK SEBELUM KUCURAN DANA CAIR. **INI AMANAT "TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL"**

## **3. PROYEKSI RETURN ON INVESTMENT (ROI) DAN DIVIDEN :**

PENYERTAAN MODAL ADALAH INVESTASI, BUKAN HIBAH. HARUS ADA KEJELASAN KAPAN MODAL INI AKAN KEMBALI KE KAS DAERAH.

**PERTANYAAN KAMI** : APA PROYEKSI KEUNTUNGAN (LABA) DAN BESARAN DIVIDEN YANG AKAN DISETORKAN BUMD KEPADA PEMKAB SUMBAWA DALAM 5 TAHUN KEDEPAN (2026-2030) ?. PADA TAHUN BERAPA **BREAK EVEN POINT (BALIK MODAL)** DARI SUNTIKAN DANA INI DIHARAPKAN TERCAPAI ?

**TUNTUTAN FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN**, KAMI MEMINTA ADANYA KALUSUL PERJANJIAN KINERJA YANG MENGIKAT ANTARA BUPATI DAN DIREKSI BUMD, JIKA TARGET KINERJA TIDAK TERCAPAI, HARUS ADA KONSEKUENSI TEGAS BAGI MANAJEMEN BUMD.



#### 4. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA.

MENINGAT KETERBATASAN FISKAL DAERAH, SETIAP RUPIAH PENYERTAAN MODAL HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA TRANSPARAN.

**PERTANYAAN KAMI :** MEKANISME PENGAWASAN SEPERTI APA YANG AKAN DITERAPKAN ?. APAKAH AKAN ADA LAPORAN TRIWULAN KHUSUS KEPADA KOMISI TERKAIT DI DPRD ?, ATAU BAGAIMANA MEMASTIKAN TIDAK TERJADI MARK-UP PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENGGUNAAN MODAL TERSEBUT ?.

**SIKAP FRAKSI KAMI :** FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN MENDORONG ADANYA AUDIT BERKALA OLEH BPKP ATAU AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN KHUSUS UNTUK PROYEK-PROYEK YANG DIBIYAI DARI PENYERTAAN MODAL INI.

#### 5. DAMPAK TERHADAP APBD DAN RUANG FISKAL

PENYERTAAN MODAL BERSUMBER DARI APBD DI TAHUN 2026 INI, KITA DIHADAPKAN PADA TANTANGAN PENURUNAN DANA PUSAT.

**PERTANYAAN KAMI :** APAKAH PENYERTAAN MODAL INI AKAN MENGANGGU POS-POS BELANJA PENTING LAINNYA, SEPERTI BELANJA PEGAWAI, LAYANAN DASAR PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN ?, APAKAH SUDAH DILAKUKAN KAJIAN DAMPAK FISKAL YANG KONPREHENSIF ?.

KAMI MENYARANKAN AGAR PENYERTAAN MODAL INI DILAKUKAN SECARA BERTAHAP (PHASING), TERGANTUNG PADA PENCAPAIAN KINERJA (KINERJA BAIK, CAIR TAHAP BERIKUTNYA), JANGAN LANGSUNG DICAIRKAN SEKALIGUS DITAHUN PERTAMA JIKA KINERJA BELUM TERBUKTI.

SECARA GARIS BESAR PRINSIP FRAKSI KAMI TERKAIT RANPERDA INI :

- A. MENDUKUNG UPAYA PENGUATAN PERMODALAN BUMD DEMI KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH, **DENGAN CATATAN** HARUS DISERTAI REFORMASI TATA KELOLA YANG RADIKAL.
- B. KAMI MEMINTA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELENGKAPI DATA-DATA YANG KAMI MINTA DIATAS (LAPORAN KEUANGAN TERAUDIT, BUSINESS PLAN, PROYEKSI DIVIDEN, DAN KAJIAN DAMPAK FISKAL) DALAM MASA PEMBICARAAN TINGKAT LANJUT (PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS/PANSUS). FRAKSI KAMI JUGA INGIN MENGETAHUI BERAPA KOMPOSISI SAHAM YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DALAM SERTIFIKAT KEPEMILIKAN SAHAM KHUSUSNYA PT. BANK NTB SYARIAH DAN PT. BPR NTB (PERSERODA).
- C. KAMI AKAN MENGAWAL PROSES INI AGAR TIDAK TERJADI PEMBORORSAN UANG RAKYAT. PENYERTAAN MODAL HARUS BERBUAH MANIS BERUPA PENINGKATAN PAD DAN PELAYANAN PUBLIK, BUKAN MENJADI BEBAN BARU BAGI APBD.



**HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT**

**2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

“TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL” HARUS TERCERMIN DARI PERDA YANG HUMANIS, PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL, DAN PENCEGAHAN KONFLIK SERTA BUKAN REPRESIF.

FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN MENYAMBUT BAIK INISIATIF PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMPERBAHARUI REGULASI MENGENAI KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN (TRANTIBUM) SERTA LINMAS. DALAM DINAMIKA SOSIAL MASYARAKAT SUMBAWA YANG SEMAKIN KOMPLEKS, ATURAN YANG JELAS SANGAT DIPERLUKAN, NAMUN KAMI INGIN MENEKANKAN BAHWA PENDEKATAN KEAMANAN TIDAK BOLEH LAGI BERSIFAT REPRESIF SEMATA, MELAINKAN HARUS MENGEDEPANKAN ASPEK HUMANIS DAN PREVENTIF.

BERIKUT CATATAN DAN PANDANGANFRAKSI KAMI TERKAIT RANPERDA TERSEBUT :

**1. PENDEKATAN HUMANIS VS REPRESIF:**

PERTANYAAN KAMI, BAGAIMANA MEKANISME PENGAWASAN AGAR SATPOL PP DALAM MENJALANKAN TUGASNYA TIDAK BERTINDAK BERLEBIHAN TERHADAP PELANGGAR PERDA, TERUTAMA PEDAGANG KAKI LIMA ATAU KELOMPOK RENTAN ?. APAKAH ADA SANKSI TEGAS BAGI APARAT YANG MELANGGAR PROSEDUR ?

SIKAP KAMI, MENOLAK KERAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI ATAU KEKERASAN ATAS NAMA PENEGAKAN PERDA, DAN ATURAN INI HARUS MENJADI PELINDUNG RAKYAT, BUKAN MENJADI ALAT INTIMIDASI.

**TEGASKAN DALAM BATANG TUBUH** : SATPOL PP WAJIB MENGEDEPANKAN PEMBINAAN BERBASIS KEARIFAN TAU DAN TANA SAMAWA SEBELUM PENINDAKAN, PASAL SANKSI JANGAN KARET. BEDAKAN TEGAS PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PIDANA.

DAN WAJIB ADA ALOKASI ANGGARAN UNTUK PELATIHAN HAM DAN MEDIASI KONFLIK BAGI PERSONIL TRANTIB SETIAP TAHUN.

**2. PERAN LINMAS (PERLINDUNGAN MASYARAKAT)**

RANPERDA INI JUGA MENYINGGUNG TENTANG LINMAS, SAMPAI SEJAUH MANA PERAN LINMAS DIPERKUAT ?, APAKAH ADA ANGGARAN KHUSUS UNTUK PELATIHAN DAN KESEJAHTERAAN MEREKA, ATAU MEREKA HANYA DIHARAPKAN BEKERJA SUKARELA.

**TUNTUTAN FRAKSI KAMI** : LINMAS ADALAH MITRA STRATEGIS DI TINGKAT DESA/KELURAHAN, MEREKA HARUS DIBERDAYAKAN, BUKAN SEKEDAR DIFORMALKAN.



### 3. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL :

**PERTANYAAN FRAKSI KAMI :** BAGAIMANA ATURAN INI MENGATUR PENCEGAHAN KONFLIK HORIZONTAL ATAR KELOMPOK ATAU ANTAR WARGA ?, APAKAH ADA MEKANISME MEDIASI BERBASIS KOMUNITAS YANG DIATUR SECARA RINCI SEBELUM TINDAKAN HUKUM DIAMBIL.

### 4. PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DAN RUANG PUBLIK :

**CATATAN FRAKSI KAMI** SERING KALI ISU KETERTIBAN BENTROK DENGAN HAK EKONOMI WARGA KECIL;, KAMI MEMINTA JAMINAN BAHWA PKL TIDAK SERTA MERTA DIGUSUR TANPA SOLUSI YANG LAYAK. **“KETERTIBAN TIDAK BOLEH MEMATIKAN NAFKAH RAKYAT”**

KESIMPULAN SIKAP FRAKSI KAMI TERKAIT RANPERDA INI ADALAH :

FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN MENDUKUNG RANPERDA INI DENGAN CATATAN UTAMA **“PENEGAKAN HUKUM HARUS BERMARTABAT”**, DAN KAMI AKAN MENGAWAL PASAL-PASAL YANG BERPOTENSI KRIMINALISASI TERHADAP WARGA KECIL.

### 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK :

ISU SANITASI DAN AIR LIMBAH DOMESTIK ADALAH ISU KESEHATAN DASAR YANG SERING TERBAIKAN, FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN MENILAI RANPERDA INI SANGAT KRUSIAL UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN WABAH PENYAKIT DI KAB. SUMBAWA, NAMUN, ATURAN DIATAS KERTAS TIDAK AKAN BERARTI TANPA INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI.

RANPERDA INI MERUPAKAN UJIAN MISI **“PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”**.

**DATA & TUNTUTAN FRAKSI KAMI :**

#### 1. KESIAPAN INFRASTRUKTUR (IPAL KOMUNAL/INDIVIDUAL) :

**FAKTANYA :** RPJMD 2021-2026 SUDAH MENITIKBERATKAN **“SANITASI LAYAK”**. DOKUMEN SSK POKJA AMPL SUDAH MEMUAT DATA IPAL KOMUNAL DAN PEMETAAN KAWASAN.

**SATU DATA SUMBAWA** SUDAH MERINCI DESA/KELURAHAN STBM PER KECAMATAN.

**PERSOALANNYA :** JIKA DOKUMEN SUDAH LENGKAP, **KENAPA CAKUPAN SANITASI LAYAK BELUM 100% ?** KENAPA MASIH BANYAK WARGA PESISIR DAN BANTARAN SUNGAI BAB SEMBARANGAN.



JANGAN SAMPAI WARGA DIPAKSA BAYAR RESTRIBUSI ATAU DENDA, TAPI SALURAN PEMBUANGANNYA TIDAK ADA ATAU MAPET.

**SYARAT FRAKSI KAMI :**

- A. ROADMAP SPAL 2026-2030 DALAM PERDA WAJIB SINKRON DENGAN SSK.
- B. SEBUTKAN PRIORITAS LOKASI IPAL KOMUNAL BERDASARKAN PEMETAAN POKJA AMPL.
- C. CANTUMKAN TARGET JUMLAH MBR PENERIMA SUBSIDI TANGKI SEPTIK TIAP TAHUN DAN SUMBER ANGGARANNYA. RETRIBUSI HARUS BERKEADILAN. WAJIB ADA SKEMA SUBSIDI SILANG.

**2. AFIRMASI UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU :**

**PERTANYAANNYA :** BAGIMANA SKEMA PEMBIAYAAN BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG TIDAK MAMPU MEMBANGUN TANGKI SEPTIK STANDAR ATAU MENYAMBUNG IPAL KOMUNAL ?

CANTUMKAN TARGET JUMLAH MBR PENERIMA SUBSIDI TANGKI SEPTIK TIAP TAHUN DAN SUMBER ANGGARANNYA. RETRIBUSI HARUS BERKEADILAN. WAJIB ADA SKEMA SUBSIDI SILANG.

**3. PENGAWASAN KUALITAS AIR BUANGAN :**

**PERTANYAAN KAMI :** SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB MELAKUKAN UJI KUALITAS AIR LIMBAH SEBELUM DIBUANG KE SUNGAI/LAUT ?, APAKAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP MEMILIKI LABORATORIUM DAN SDM YANG CUKUP UNTUK MELAKUKAN MONITORING RUTIN ?.

**4. INTEGRASI DENGAN TATA RUNGAN :**

**CATATAN FRAKSI KAMI :** SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH HARUS TERINTEGRASI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW), JANGAN SAMPAI KAWASAN PADAT PENDUDUK DIBANGUN TANPA SISTEM LIMBAH YANG MEMADAI, BARU KEMUDIAN DIGUSUR ATAU DISANGSI BELAKANGAN.

**KESEIMPULAN SIKAP FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN TERKAIT RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK INI :** KAMI MENDUKUNG PENUH RANPERDA INI DEMI UNTUK KESEHATAN MASYARAKAT SUMBAWA, NAMUN MENDESAK AGAR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENJADI PRIORITAS UTAMA SEBELUM SANGSI ADMINISTRATIF.

**HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT**

**4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**



BUPATI MENEGASKAN “PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENJADI PERHATIAN UTAMA”. KABUPATEN LAYAK ANAK ADALAH IMPLEMENTASINYA.

**DATA DAN TUNTUTAN FRAKSI KAMI ADALAH :**

ANGKA STUNTING DI KAB. SUMBAWA 29,8% PADA 2024, TARGET TURUNNYA MENJADI 22% PADA 2026.

**PER JANUARI 2026, MASIH ADA 16.299** KELUARGA RENTAN STUNTING (KRS). STRATEGI-NYA : “PENGUATAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF DI TINGKAT DESA/KECAMATAN” HARUS DIJAMIN REGULASINYA.

**SYARAT DARI FRAKSI KAMI : MANDATORY SPENDING MINIMAL 5% APBD** UNTUK HAK ANAK LINTAS OPD, HARUS MASUK BATANG TUBUH PERDA. WAJIBKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK PMT POSYANDU, DAPUR SEHAT, DAN INSENTIF KADER DI 16.299 KRS. SERTA RAPOR KINERJA KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) TIAP OPD + SANKSI JIKA TARGET STUNTING 22% MELESET.

**5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

RANPERDA INI UNTUK MENGUJI/TES UNTUK MISI BUPATI SUMBAWA “**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN TRANSPARAN**”.

**TUNTUTAN FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN : KAMI MINTA** DIBUKA KE PUBLIK HASIL EVALUASI SOTK LAMA. OPD MANA YANG TUMPANG TINDIH? JABATAN MANA YANG MISKIN FUNGSI?

**PADA PRINSIPNYA FRAKSI KAMI:** BERHARAP STRUKTURNYA MISKIN STRUKTUR, TAPI KAYA FUNGSI.

DENGAN TARGET: LAYANAN ADMINDUK DAN IZIN UMKM SELESAI 1 HARI. MORATORIUM PENAMBAHAN BELANJA PEGAWAI & REKRUTMEN NON-ASN BARU SAMPAI PENATAAN SELESAI. SELARAS DENGAN AMANAT BUPATI BAHWA “RPJMD HARUS DITETAPKAN PALING LAMBAT ENAM BULAN SETELAH PELANTIKAN”.

**SIKAP FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN :**

BERDASARKAN CATATAN KRITIS BERBASIS DATA DI ATAS, FRAKSI KAMI MENYATAKAN : DAPAT MENERIMA 5 RANPERDA INI UNTUK DIBAHAS KE TINGKAT PANSUS, DENGAN SYARAT SELURUH TUNTUTAN, DATA, DAN ROADMAP YANG KAMI SAMPAIKAN DIAKOMODIR SECARA TERTULIS DALAM DAFTAR IINVENTATISASI MASALAH (DIM) DAN DIBAHAS TUNTAS.



# **FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA**

Jln. Lintas Sumbawa Bima KM 5 Sumbawa Besar-NTB



KAMI AKAN MENGAWAL DI PANSUS. SEBAB “SUMBAWA UNGGUL, MAJU, DAN SEJAHTERA” HANYA TERCAPAI :

**JIKA RP. 119,2 MILIAR MODAL BUMD MENGHASILKAN PAD,**

**JIKA SSK JADI IPAL KOMUNAL, DAN**

**JIKA 22% TARGET STUNTING DI TAHUN 2026 INI BUKAN SEKADAR ANGKA.**

**HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,**

DEMIKIAN PENDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN, TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026. PADA PRINSIPNYA FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN SEPAKAT UNTUK DIAJUKAN DAN DIBAHAS PADA SIDANG-SIDANG TINGKAT LANJUT, TENTUNYA DENGAN KELAYAKAN DAN ANALISA INVESTASI UNTUK MENDAPATKAN KINERJA USAHA YANG OPTIMAL.

SEMOGA APA YANG MENJADI HAJAT KITA SEMUA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT DAPAT DIWUJUDKAN DENGAN MENJADIKAN 5 RANPERDA INI MENJADI PERDA KABUPATEN SUMBAWA, YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN KITA SEMUA DALAM MEMBANTU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA INI.

ATAS SEGALA PERHATIANNYA KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH,-

***WABILLAH HITAUFIK WALHIDAYAH WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI  
WABARAKATUH,***

SUMBAWA BESAR, 30 APRIL 2026

FRAKSI DEMOKRAT PPP PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN SUMBAWA

- |   |          |                           |
|---|----------|---------------------------|
| <b>1. KETUA MERANGKAP ANGGOTA</b>       | <b>:</b> | <b>H. ZAINUDDIN SIRAT</b> |
| <b>2. WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA</b> | <b>:</b> | <b>SRI WAHYUNI, S.AP</b>  |
| <b>3. SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA</b>  | <b>:</b> | <b>SAIPUL ARIF</b>        |
| <b>4. ANGGOTA</b>                       | <b>:</b> | <b>JULIANSYAH, SE</b>     |
| <b>5. ANGGOTA</b>                       | <b>:</b> | <b>SRI HASTUTI</b>        |
| <b>6. ANGGOTA</b>                       | <b>:</b> | <b>AHMAD NAWAWI</b>       |